

DAMPAK KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA YANG JUJUR DAN BERINTEGRITAS DI SMA SEMESTA KOTA SEMARANG

Eko Handoyo, Martien Herna Susanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Email: eko_pkn@yahoo.co.id

Abstrak. Hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Belajar dari pengalaman negara lain yang relatif berhasil memberantas korupsi, selain aspek penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak kalah pentingnya adalah aspek pencegahan dalam bentuk Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah: 1) Penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang, 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi padapenguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang. Guna mencapai tujuan tersebut, maka dalam kegiatan ini dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu: *pertama*, presentasi arti korupsi, ciri-ciri korupsi, bentuk-bentuk korupsi, sebab-sebab korupsi dan dampak korupsi. *Kedua*, penayangan film tentang korupsi. *Ketiga*, dialog tentang pendidikan anti korupsi dan lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia.

Kata kunci : penguatan kesadaran, pendidikan antikorupsi, generasi yang jujur dan berintegritas

PENDAHULUAN

Pada tahun 2011 banyak skandal korupsi yang terungkap seperti kasus Muhammad Nazarudin dan kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kasus lain yang banyak menyita perhatian publik adalah korupsi yang terjadi pada Badan Anggaran DPR yang menyeret banyak nama anggota dewan, menambah panjang daftar praktik korupsi yang dilakukan oleh para petinggi

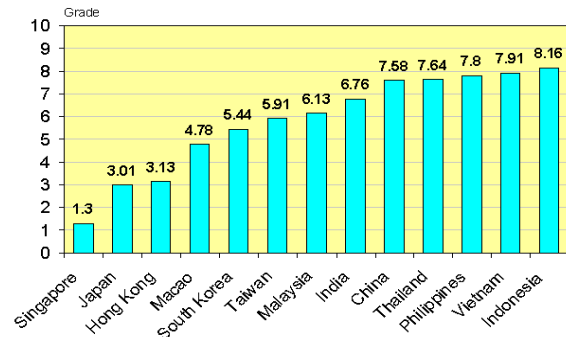
negara ini. Bahkan korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu isu yang paling krusial yang hingga ini belum dapat dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Kondisi ini membangun opini publik, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat kronis sehingga sangat sulit untuk diberantas. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.

Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupaya untuk dapat memberantas korupsi. Sebagaimana instruksi Presiden SBY yang disampaikan saat peresmian gedung Majelis Tafsir Alquran di Solo, tanggal 8 Maret 2009. Dalam pidato resminya tersebut, Presiden SBY mengajak bangsa Indonesia berjihad melawan korupsi. Meminta siapapun yang memiliki kekuasaan di eksekutif dan legislatif untuk mencari rezeki dengan halal dan tidak menyalahgunakan kekuasaan (Kompas, 21 Januari 2012).

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, Indonesia kembali dinilai sebagai negara paling terkorup di Asia pada awal tahun 2004 dan 2005 berdasarkan hasil survei dikalangan para pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). Hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Pada tahun 2005, Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia. Peringkat negara terkorup setelah Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan PERC, yaitu India (8,9), Vietnam (8,67), Thailand, Malaysia dan China berada pada posisi sejajar diperingkat keempat yang terbersih. Sebaliknya, negara yang terbersih

tingkat korupsi adalah Singapura (0,5) disusul Jepang (3,5), Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan. Rentang skor dari nol sampai 10, di mana skor nol adalah mewakili posisi terbaik, sedangkan skor 10 merupakan posisi skor terburuk. Berikut ini adalah peringkat korupsi beberapa negara di Asia tahun 2006:



Gambar 1: Peringkat Korupsi Beberapa Negara Asia Tahun 2006. (Sumber: PERC, Corruption in Asia, 2006)

Pada tahun 2011 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik menjadi 3,0 dari tahun sebelumnya yakni 2,8, tetapi Indonesia tetap dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi (Liputan 6.com, 29 Januari 2012). Menanggapi fenomena di atas, seharusnya mampu membangkitkan suatu pemahaman baru, bahwa diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang telah menggurita. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Belajar dari pengalaman negara lain yang relatif berhasil memberantas korupsi, selain aspek penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak kalah pentingnya adalah aspek pencegahan dalam bentuk Pendidikan Anti Korupsi (PAK).

Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah

sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis siswa. Setidaknya terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini. *Pertama* untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. *Kedua* adalah, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.

Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang jujur dan berintegritas, sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Pendidikan antikorupsi kepada pelajar telah dilakukan oleh KPK sejak tahun 2008, dimana pada tanggal 22 Oktober 2008, diluncurkan buku seri pendidikan anti korupsi untuk pelajar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Kuningan, Jakarta Selatan (Metro, 28 Februari 2011), sebagai tindak lanjut upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk mengembangkan program pendidikan anti korupsi ke seluruh jenjang pendidikan.

Berdasarkan analisis kondisi tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam pengabdian ini adalah: 1) bagaimana penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dapat mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang, 2) hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang.

METODE

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini metode-metode yang secara riil digunakan adalah: 1) presentasi arti korupsi, ciri-ciri korupsi, bentuk-bentuk korupsi, sebab-sebab korupsi dan dampak korupsi, 2) Penayangan film tentang korupsi, dan 3) dialog tentang upaya penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi dalam mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian “Penguatan Kesadaran Kolektif Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi dalam mewujudkan Generasi Muda yang Jujur dan Berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang”, meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: *pertama*, presentasi arti korupsi, ciri-ciri korupsi, bentuk-bentuk korupsi, sebab-sebab korupsi dan dampak korupsi.

Ceramah dilaksanakan di SMA Semesta Kota Semarang dengan peserta siswa SMA Semesta Kota Semarang, yakni sebanyak 49 orang. Kegiatan ini mengikutsertakan perwakilan dari Kelas XI yang merupakan pengurus OSIS SMA Semesta Kota Semarang. Dalam pengabdian ini, narasumber tidak memberikan materi secara detail dan terinci,

melainkan mengemasnya dalam contoh-contoh perilaku korupsi yang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh siswa sekolah dan masyarakat. Tayangan materi disampaikan melalui LCD yang digunakan sebagai media sosialisasi.

Kedua, penayangan film tentang korupsi. Dalam tayangan film ini, peserta diberikan contoh-contoh perilaku tindakan korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan, bahwa korupsi telah berurat dan berakar di bumi Indonesia. *Ketiga*, dialog tentang pendidikan anti korupsi dan lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia. Dalam sesi ini ditunjukkan lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), *Indonesian Corruption Watch* (ICE), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan *Transperency International Indonesia*. Berikut ini dokumentasi pengabdian masyarakat.



Gambar 2 Narasumber dan peserta sedang berinteraksi, dimana peserta memberikan pertanyaan atas materi yang disampaikan oleh Narasumber



Gambar 3 Peserta dengan antusias berdialog dengan Narasumber

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh tim, pengabdian tentang Penguatan Kesadaran Kolektif Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi dalam mewujudkan Generasi Muda yang Jujur dan Berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang, secara umum dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini nampak dari antusiasme peserta baik dalam mengikuti ceramah, tanya jawab dan dialog dengan narasumber. Pada kesempatan ini, peserta diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari peserta lain, sehingga terjadi diskusi yang melibatkan seluruh peserta pengabdian. Dalam kesempatan tersebut, tim pengabdian juga membagi buku saku pendidikan anti korupsi, sehingga siswa benar-benar dapat memahami tindak pidana korupsi. Motivasi juga terus diberikan oleh tim pengabdian kepada peserta agar setelah mereka sosialisasi Pendidikan Antikorupsi ini, para siswa memiliki pengetahuan tentang arti korupsi, ciri-ciri korupsi, bentuk-bentuk korupsi sekaligus memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam memberantas korupsi dan terwujudnya generasi muda yang jujur dan berintegritas.

Pembahasan

Penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dapat mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang. Berdasarkan atas hasil rilis *Transparency International* (TI) menunjukkan dari tahun 1995-2005 posisi Indonesia berada pada kisaran 5 besar negara terkorup di dunia (TII, 2006). Sementara itu menurut survei yang dilakukan oleh *Pacific Economic and Risk Consultancy* (PERC) sebagaimana dikutip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (2006) menunjukkan bahwa pada tahun 2005 Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Berdasarkan atas hasil rilis *Transparency International* (TI) menunjukkan dari tahun 1995-2005 posisi Indonesia berada pada kisaran 5 besar negara terkorup di dunia (TII, 2006). Sementara itu menurut survei yang dilakukan oleh *Pacific Economic and Risk Consultancy* (PERC) sebagaimana dikutip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (2006) menunjukkan bahwa pada tahun 2005 Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia.

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi ada dua hal yang dapat dilakukan oleh sekolah. *Pertama*, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian tulus, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. Integritas mensyaratkan bukan hanya kedewasaan dan kemauan, tetapi keberanian individu dalam mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan

sebagai prinsip dasar keterlibatan politik.

Mencermati maraknya kasus korupsi, maka perlu upaya sedini mungkin untuk memperkenalkan pendidikan anti korupsi kepada anak sebagai upaya pencegahan. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan diyakini akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Demikian juga kepribadian anti korupsi, harus dibangun sedini mungkin, karena tidak mungkin tiba-tiba institusi pendidikan mampu mencetak generasi yang bersih dari korupsi di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang sangat sarat akan korupsi. Oleh karena itu, institusi pendidikan dituntut untuk berperan memberikan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik. Tujuan dari pendidikan anti-korupsi adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil peserta didik dalam melawan korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, peserta didik setidaknya-tidaknya menguasai 5 (lima), yaitu: 1) memahami informasi. Bahaya korupsi biasanya ditunjukkan menggunakan argumen ekonomi, sosial dan politik. 2) mengingat. Tidak diragukan lagi, dengan proses mengulang, anak akan ingat, namun jika yang sama diulang lebih dari tiga kali, anak akan merasa jenuh dan merasa kehilangan hak untuk membuat pilihan bebas. Jadi perlu mengubah bentuk penyediaan informasi dengan cara yang paling tak terduga dan mengesankan (ada variasi), 3) mempersuasi (membujuk) diri sendiri untuk bersikap kritis. Efeknya akan lebih kuat jika menggunakan metode pembelajaran aktif, 4) pengenalan pendidikan anti korupsi. Pengenalan pendidikan anti korupsi harus bertahap sesuai dengan usia

anak, dan 5) dalam menerapkan pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Pendidikan berbasis nilai menjadi penting. Sudah seharusnya pendidikan yang selama ini dirasakan hanya berperan dalam mencerdaskan bangsa dalam ranah kognitif saja, harus lebih diarahkan pada keseimbangan antara kecerdasan kognitif kecerdasan mental. Untuk itu pendidikan berbasis nilai (*value based education*) menjadi penting untuk dilakukan. Mendidik siswa yang utuh, pintar dan berkepribadian. Idealnya pendidikan sebagai perangkat transformasi kebudayaan mampu memberikan peluang bagi upaya pengembangan diri (*self realization*) di bidang intelektual maupun emosi. Terkait dengan masalah korupsi yang seolah telah menjadi bagian dari budaya bahkan *way of live* bangsa Indonesia, maka perlu dikembangkan suatu pendidikan antikorupsi yang menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pada akhirnya terwujud generasi yang “bersih” dan “anti korupsi”.

Nilai-nilai yang perlu ditanamkan agar dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti: 1) kejujuran, 2) kepedulian dan menghargai sesama, 3) kerja keras, 4) tanggungjawab, 5) kesederhanaan, 6) keadilan, 7) disiplin, 8) kooperatif, 10) keberanian, dan 11) daya juang/kegigihan. Pengintegrasian nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti koruptif. Penanaman nilai ini tidak sebatas pada insersi mata pelajaran, tetapi perlu diberikan disemua lini pendidikan. Nilai ini hendaknya

selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intrakurikuler maupun ekstra kurikuler.

Dalam Pendidikan Anti Korupsi guru berperan dalam: 1) mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya, 2) mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi, 3) mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak), 4) memberi kontribusi pada kurikulum standar melalui penanaman nilai-nilai, penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, manage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial di sekolah-masyarakat- lingkungan, dan lain-lain).

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Upaya Penguatan Kesadaran Kolektif Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam mewujudkan Generasi Muda yang Jujur dan Berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang

Berkembangnya praktek-praktek korupsi telah mengakar ke seluruh lini kehidupan bangsa Indonesia. Hingga saat ini Indonesia masih menduduki peringkat 10 besar dalam indeks persepsi korupsi. Berikut ini lampiran data dari *Transperenscy International* tentang perkembangan posisi Indonesia dari tahun-ke tahun :

Tabel 1 Perkembangan Posisi Indonesia Berdasarkan Data *Corruption Perseption International*

Tahun	Indeks CPI	Peringkat
1995	1,94	1 dari 41 negara
1996	2,65	9 dari 54 negara
1997	2,72	7 dari 52 negara
1998	2,0	5 dari 85 negara
1999	1,7	3 dari 99 negara
2000	1,7	5 dari 90 negara
2001	1,9	3 dari 91 negara
2002	1,9	6 dari 102 negara
2003	1,8	5 dari 133 negara
2004	2,0	9 dari 145 negara
2005	2,2	6 dari 159 negara
2006	2,4	7 dari 163 negara

Dari data di atas dapat diketahui, bahwa peringkat terburuk yang pernah dicapai Indonesia adalah pada tahun 1995 yang menduduki posisi terbawah sebagai negara paling korup se-Asia. Tahun 1997 posisi Indonesia sedikit mengalami peningkatan, dan ini merupakan indeks terbaik yang pernah diperoleh Indonesia pada 12 tahun terakhir yakni dengan skor 2,72. Namun setelah tahun 1997, indeks persepsi korupsi tersebut terus mengalami penurunan. Kisaran 10 besar negara korup, menjadikan perlu upaya yang sungguh-sungguh dari semua elemen negara dan masyarakat untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang marak dilaksanakan yaitu dengan melibatkan institusi pendidikan.

Pendidikan perlu diarahkan pada keseimbangan antara kecerdasan kognitif kecerdasan mental. Untuk itu pendidikan berbasis nilai (*value based education*) menjadi penting untuk dilakukan dalam mendidik siswa yang utuh, pintar dan berkepribadian. Terdapat beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti kejujuran, kepedulian dan menghargai sesama, kerja keras, tanggungjawab, kesederhanaan, keadilan, disiplin, kooperatif, keberanian, daya juang dan kegigihan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti koruptif. Penanaman nilai ini tidak sebatas pada insersi matapelajaran, tetapi perlu diberikan disemua lini pendidikan. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Upaya konkrit yang dilaksanakan untuk mencetak para *pioneer-pioneer* antikorupsi yang berasal dari para siswa adalah melalui penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi muda yang jujur dan

berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang. Penguatan yang dimaksud dalam pengabdian ini adalah penguatan kesadaran generasi muda tentang dampak korupsi melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas. Selama ini merosotnya kualitas pendidikan nasional hanya terfokus pada persoalan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing di era pasar global, sehingga yang disorot hanyalah dari hasil kelulusan (*output*) belaka. Sementara penanaman moral dan pencapaian tujuan pendidikan nasional untuk mampu mencetak generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual menjadi terlupakan. Pendidikan karakter dan akhlak yang baik selama ini kurang mendapat penekanan dalam sistem pendidikan. Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat anti korupsi di kalangan generasi muda. Penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang diberikan kepada siswa agar semangat anti korupsi tertanam sejak dini kepada siswa, sehingga jika mereka sudah terjun bermasyarakat semangat tersebut akan terus terbawa dan mempengaruhi lingkungannya. Guna mendukung berhasilnya pendidikan anti korupsi di sekolah, maka tugas penting guru dalam pendidikan anti korupsi di sekolah adalah bertindak sebagai garda depan dari proses pendidikan. Selayaknya guru menjadi teladan sekaligus sebagai motivator. Dalam pendidikan anti korupsi guru berperan dalam: 1) mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya, 2) mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi, 3) mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak, 4) memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan: penanaman nilai-nilai, penguatan kapasitas

siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, manage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial di sekolah-masyarakat- lingkungan, dan lain-lain).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tugas pendidikan antikorupsi adalah tugas semua orang sesuai dengan porsi dan kapasitas masing-masing. Realitas menunjukkan bahwa perilaku menyontek oleh beberapa kalangan peserta didik diberi makna baru, yakni sebagai cara dan strategi untuk meringankan beban biaya orang tua. Karena melalui menyontek peserta didik akan memperoleh nilai bagus dan cepat lulus sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan, dan tanggapan langsung dari peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Mencetak Generasi Bersih, Transparan, dan Profesional Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di SMA Sedes Sapientiae Kota Semarang”, ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Partisipasi dan tanggapan peserta sangat baik. Siswa selaku peserta kegiatan pengabdian sosialisasi pendidikan anti korupsi pada akhirnya mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak buruk korupsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk berperan serta dalam memberantas korupsi. Melalui sosialisasi ini diharapkan terjadi perubahan sikap siswa sekolah menengah dari sikap membiarkan, memahami, dan memaafkan korupsi ke sikap menolak korupsi.

Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah: kegiatan ini banyak manfaatnya sehingga

perlu ditindaklanjuti dan diperluas ruang lingkupnya, bila memungkinkan diadakan kerjasama dengan para stakeholder, institusi maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah ini. Misal: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dinas pendidikan, Universitas LPTK, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat pemerhati masalah korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekosusilo, Madyo, Drs. Bambang Triyanto, Drs. 1990. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang: Effhar dan Dahara Prize.
- Suhardjono, Azis Hoesein, dkk. 1996. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit. Pengembangan Profesi Widyaaiswara*. Jakarta: Depdikbud. Dikdasmen.
- Suharsimi, Suhardjono dan Supardi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumaryanto, F. Totok. 2009. *Praktik Penyusunan Proposal dan Pelaporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*. Makalah disampaikan pada Kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SMP di Kabupaten Kendal, Kamis, 13 Agustus 2009.
- Suparno, Paul. 2004. *Guru Demokratis di Era Reformasi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Widoyoko, S. Eko Putro. 2008. *Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Profesi Guru*. Makalah disajikan dalam Seminar Peningkatan Kualitas Profesi Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah, Purwokerto tanggal 14 September 2008.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.